
AN NAHDLIYAH

JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

E-ISSN: 2830-5612

e-mail: annahdliyah@stainumalang.ac.id

POLITIK, EKONOMI, PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Radnasari

Universitas Borneo Tarakan

Jl. Amal Lama No. 01 Kel, Pantai Amal, Kec. Tarakan Tim., Kota
Tarakan, Kalimantan Utara

e-mail: sariradna1@gmail.com

Abstrak: untuk membentuk sistem kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat dibutuhkan kolaborasi kekuatan politik, kemapanan ekonomi dan kemampuan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia yang beradab dapat dilakukan melalui sektor pendidikan baik formal maupun non formal. Maka perhatian pemerintah terhadap pendidikan suatu negara harus menjadi salah satu agenda besar dalam membuat kebijakan. Sumber daya manusia atau pendidikan yang bermutu sangat tergantung kebijakan pemerintah dalam menentukan alokasi anggaran pendidikan. Sehingga, dengan adanya dukungan politik dari pemerintah, SDM yang berkualitas dan mapan secara ekonomi, kemakmuran berada dalam genggamannya.

Kata Kunci: Politik, Ekonomi, Sumber Daya Manusia, Kebijakan Pembiayaan Pendidikan

A. Pendahuluan

Politik, ekonomi dan pendidikan merupakan tiga komponen penting, karena semuanya adalah bagian yang ikut mempengaruhi sistem kehidupan sosial dan kebudayaan manusia. Komponen-komponen tersebut memiliki otoritasnya masing-masing. Politik adalah sistem ketatanegaraan yang disepakati untuk menghantarkan bangsa menuju cita-cita seluruh rakyatnya, dan suatu sistem yang mengatur

kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Ekonomi merupakan wadah dimana sektor industri melekat diatasnya. Sedangkan pendidikan adalah proses kulturisasi agar lebih maju, dan proses pengembangan potensi manusia sesuai bakat dan minat untuk memperkuat dukungan terhadap penggalan sumber daya alam menuju terciptanya masyarakat yang dicita-citakan.¹

Meskipun politik, ekonomi dan pendidikan memiliki otoritas dan wilayahnya masing-masing. Akan tetapi ketiga komponen tersebut memiliki relasi yang sangat kuat untuk saling menapong. Suatu perpolitikan yang kuat merupakan hasil dukungan dari sistem ekonomi yang mapan. Sistem ekonomi yang mapan tentunya dikelola dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk memperoleh SDM yang berkualitas harus ditopang dengan pendidikan yang bermutu. Sementara pendidikan yang bermutu tidak lepas dari pengambilan kebijakan politik negara. Oleh sebab itu, ketiga sektor tersebut merupakan komponen yang sangat urgen dalam perkembangan bangsa dan negara.²

Relasi antara politik, ekonomi, masyarakat dan pendidikan menunjukkan bahwa komponen tersebut saling besinergi untuk membawa suatu bangsa dan negara mencapai pembangunan yang telah dicita-citakan. Maka dari itu makalah ini akan memaparkan tentang politik, ekonomi, pembangunan SDM, pendidikan serta hubungan komponen tersebut dalam membangun budaya dan peradaban bangsa dan negara.

B. Pembahasan

1. Politik

Kata politik berasal dari bahasa Yunani "*Polis*" yang artinya negara-atau kota. Pada zaman Yunani di dalam suatu negara/kota, orang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya. Ketika manusia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, berusaha meraih kesejahteraan pribadi melalui sumber daya yang ada, atau berupaya memengaruhi orang lain agar menerima pandangannya, mereka sibuk dengan kegiatan yang dinamakan politik.³

¹ Kasful Anwar Us, "Dimensi Hubungan Negara, Politik Dan Pendidikan", *Jurnal Ta'dib*, Vol. Xv. No. 02. Edisi, Nopember 2010

² Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2010), 31

³ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, cet. I, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 18

Menurut Andrew Heywood sekurangnya ada empat asumsi terkait dengan makna politik yaitu:⁴

- a. Politik sebagai seni pemerintahan, yaitu politik adalah penerapan kendali dalam masyarakat melalui pembuatan dan pemberdayaan keputusan kolektif. Asumsi ini adalah yang paling tua dan telah berkembang sejak masa Yunani Kuno.
- b. Politik sebagai hubungan publik. Aristoteles dalam bukunya *Politics* menyatakan bahwa manusia adalah binatang politik. Maknanya, secara kodrati, manusia hanya dapat memperoleh kehidupan yang baik melalui komunitas politik. Lalu, dilakukan pembedaan antara lingkup “publik” dan “privat.” Kedua lingkup tersebut diperbesar menjadi state (kembangan publik) dan civil society (kembangan privat). Dalam “state” terletak institusi, seperti pengadilan, aparat pemerintah, polisi, tentara, sistem kesejahteraan sosial, dan sejenisnya, sedangkan dalam “civil society” terletak institusi, seperti keluarga, kekerabatan, bisnis swasta, serikat kerja, klub-klub, komunitas, dan sejenisnya. Masalahnya, masing-masing entitas dalam “civil society” cenderung mengedepankan kepentingannya sendiri yang kadang-kadang berbenturan dengan entitas civil society lainnya. Dengan demikian, muncullah konsep “state” untuk memoderasi dan meregulasi entitas-entitas sipil tersebut. Dalam konteks hubungan “state-civil society” inilah asumsi kedua politik diletakkan.
- c. Politik sebagai kompromi dan konsensus. Sharing atau pembagian kekuasaan adalah asumsi politik sebagai kompromi dan konsensus. Kompromi dan konsensus dilawankan dengan brutalitas, pertumpahan darah, dan kekerasan. Dalam politik, tidak ada pihak yang kepentingannya terselenggarakan 100%. Masing-masing memoderasi tuntutan agar tercapai persetujuan satu pihak dengan pihak lain. Politik suatu negara dianggap baik bilamana masalah gesekan kepentingan diselesaikan melalui kompromi dan konsensus di atas “meja”, bukan pertumpahan darah.
- d. Politik sebagai kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi orang atau kelompok lain dalam menuruti kehendaknya. Dalam konteks politik, kekuasaan yang dirujuk adalah kekuasaan sosial, yaitu produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya suatu masyarakat. Dalam asumsi ini, politik dilihat sebagai penggunaan

⁴ Andrew Heywood, *Politics*, 2nd Edition, (New York: Palgrave MacMillan, 2002), 7-12

“kapital” (yaitu kekuasaan) dalam konteks produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya tersebut.

Menurut Mulyono bahwa politik suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision Making*), kebijakan publik (*publik policy*), dan alokasi atau pendistribusian (*allocation or distribution*).⁵ Kesimpulannya politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu.

Sistem politik sama seperti sistem kehidupan lainnya, mempunyai kekhasan, yaitu adanya integrasi, keteraturan, keutuhan, organisasi, koherensi, keterhubungan, dan saling kebergantungan bagian-bagiannya. Faktor yang dapat memengaruhi sistem politik Indonesia, di antaranya faktor lingkungan, sosial budaya, dan kondisi ekonomi suatu negara. Pengaruh tersebut membentuk perilaku politik dalam masyarakat dan negara, baik pemegang kekuasaan maupun yang dikuasai dan dikendalikan oleh kekuasaan yang ada. Oleh karena itu, David Easton mengatakan bahwa sistem politik adalah kehidupan politik yang merupakan sistem interaksi yang ditentukan oleh fakta yang berhubungan dengan penyebaran nilai-nilai secara otoritatif dalam masyarakat

Menurut Rusadi, sifat negara Indonesia mengandung unsur falsafah, gagasan, cita-cita, nilai-nilai, doktrin, atau wawasan yang melekat pada Indonesia. Oleh karena itu, sistem politik Indonesia merupakan sistem khas atau politik yang bersifat keIndonesiaan yang diwarnai oleh nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 1945, nilai-nilai proklamasi, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem politik di Indonesia dapat diinterpretasikan, baik sebagai seluruh proses sejarah dari saat berdirinya negara Indonesia sampai dewasa ini maupun hanya dalam periode tertentu dari proses perjalanan sejarah. Dalam kenyataan sejarahnya, dapat dijumpai perbedaan esensial sistem politik di Indonesia dari periode yang satu ke periode yang lain, misalnya sistem politik demokrasi liberal, sistem politik demokrasi terpimpin, dan sistem politik demokrasi Pancasila, sedangkan falsafah negara tetap tidak berubah.⁶

⁵ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2010), 36

⁶ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, cet. I, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 22-23

2. Ekonomi

a. Pengertian Ekonomi

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan itu kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan (Inggris: scarcity).

Kata ekonomi pertama kali digunakan oleh Xenophone, seorang ahli filsafat Yunani. Istilah ekonomi berasal dari suku kata Yunani yaitu: *OIKOS* dan *NOMOS* yang artinya pengaturan rumah tangga. Dengan demikian, secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, cara pengelolaan rumah tangga.⁷

b. Prinsip Ekonomi

Dalam ilmu ekonomi kita mengenal suatu kaidah yang dapat dipakai sebagai pedoman umum untuk melakukan tindakan ekonomi. Kaidah itu disebut prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah: Suatu cara bertindak dengan berusaha mencapai hasil sebesar mungkin (optimal) dibandingkan dengan pengorbanan yang dikeluarkan atau suatu cara bertindak untuk mencapai hasil tertentu dengan mengeluarkan pengorbanan sekecil mungkin. Istilah lain yang berhubungan dengan prinsip ekonomi adalah efisien. Efisiensi menunjukkan perbandingan yang seoptimal mungkin antara pengorbanan dan hasil. Jadi cara kerja yang efisien menunjukkan bahwa suatu hasil dicapai dengan pengorbanan yang paling sesuai tanpa pemborosan.⁸

c. Motif Ekonomi

Motif ekonomi adalah alasan atau hal-hal yang mendorong seseorang melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi bagi seseorang itu berbeda-beda, namun motif utama yang mendorong mereka melakukan kegiatan ekonomi adalah keinginan memenuhi kebutuhan

⁷ M. Dinar dan M. Hasan, *Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Pustaka Taman Ilmu, 2018), 2

⁸ M. Dinar dan M. Hasan, *Pengantar Ekonomi...*, 5

hidup untuk mencapai kemakmuran. Adapun motif ekonomi lainnya adalah :

- 1) Motif memperoleh keuntungan Motif ini merupakan dorongan wajar bagi pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam rangka memperbesar usahanya.
- 2) Motif memperoleh penghargaan Motif ini merupakan motif agar terpuja dan dihargai oleh masyarakat sekitarnya. Untuk itu ia tampil dengan gaya mewah dan senang memberi bantuan agar mendapat pujian/penghargaan dari pihak lain.
- 3) Motif memperoleh kekuasaan ekonomi Motif ini merupakan motif ingin mendapatkan kekuasaan ekonomi, setelah seseorang sukses mengembangkan usahanya dan mendirikan cabang-cabang usahanya di setiap kota, ia tetap berusaha mengembangkan usahanya. Kadang-kadang motif memperoleh kekuasaan sulit dibedakan dengan motif memperoleh penghargaan
- 4) Motif sosial / membantu sesama Dalam hal ini kegiatan ekonomi seseorang didorong bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan berbuat sosial seperti membantu korban bencana alam, memberi sumbangan pada panti asuhan, yayasan tuna netra dll.⁹

3. Pendidikan

a. Pengertian Pendidikan

Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1, diungkapkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.” Berdasarkan pengertian tersebut, pendidikan di Indonesia adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan untuk mengembangkan potensi individu untuk memperoleh kesejahteraan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga, harapan kedepannya yang dilakukan pemerintah dalam menentukan dan menetapkan kebijakan pendidikan senantiasa selaras dengan tujuan sistem pendidikan tersebut.¹⁰

⁹ M. Dinar dan M. Hasan, *Pengantar Ekonomi...*, 5

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1

b. Komponen Pendidikan

Menurut Nanang Fattah yang dikutip oleh Mulyono selain landasan filosofis, psikologis, sosial-budaya dan nilai-nilai yang menjadi acuan, terdapat komponen-komponen yang membentuk batang tubuh pendidikan yaitu:

1) Kurikulum

Kurikulum merupakan komponen ilmu pendidikan yang berkenaan dengan tujuan dan bahan acuan interaksi, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit. Teori yang dikembangkan dalam komponen ini, meliputi teori tentang tujuan pendidikan, organisasi kurikulum, isi kurikulum dan modul-modul pengembangan kurikulum.

2) Belajar

Belajar merupakan komponen ilmu pendidikan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan interaksi ditinjau dari sudut peserta didik. Teori-teori yang dikembangkan dalam komponen ini, meliputi teori tentang, jenis, cara dan kondisi belajar serta karakteristik peserta didik.

3) Mendidik dan Mengajar

Mengajar merupakan komponen ilmu pendidikan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan interaksi ditinjau dari sudut pendidik. Teori yang dikembangkan dalam komponen ini, meliputi teori tentang karakteristik pendidik, metode, teknik dan sistem pengelolaan kelas.

4) Lingkungan Pendidikan

Lingkungan pendidikan berkenaan dengan situasi ketika interaksi belajar mengajar berlangsung. Teori yang berkaitan dengan komponen ini adalah manajemen pendidikan, bimbingan konseling, kebijakan pendidikan dan ekonomi pendidikan.

5) Evaluasi Pendidikan

Evaluasi berkaitan dengan prinsip, mental, teknik dan prosedur dengan cara-cara bagaimana pencapaian tujuan pendidikan. Seberapa

besar tingkat pencapaian kualitas program dan proses pendidikan yang bermutu.¹¹

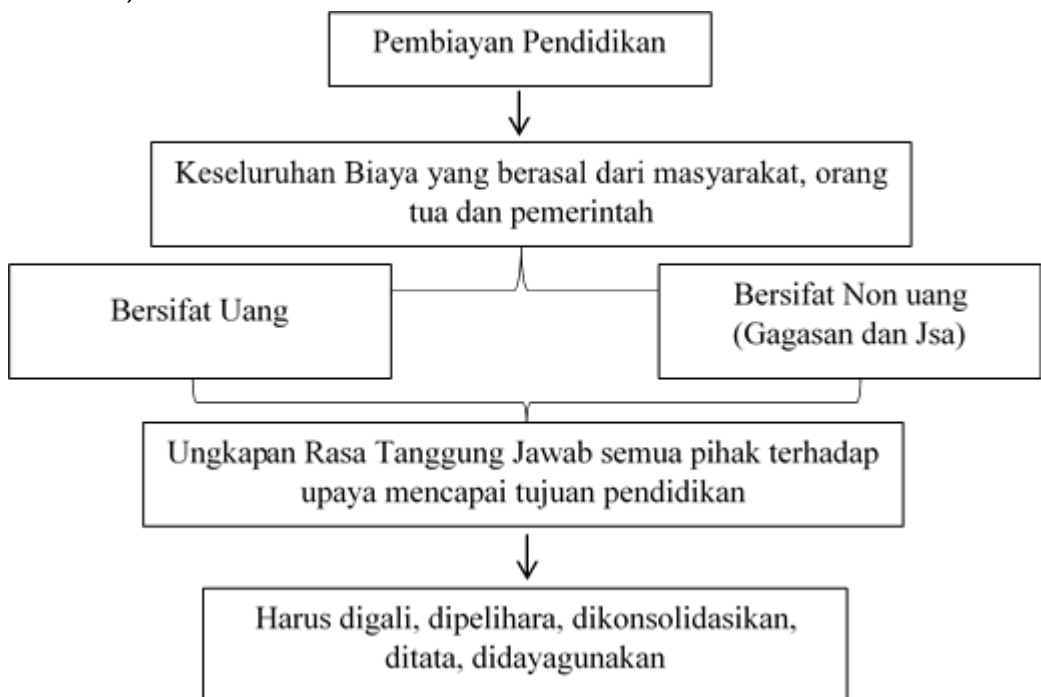
c. Pembiayaan Pendidikan

Biaya merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan di dalam suatu organisasi. Jika suatu kegiatan dilaksanakan dengan biaya yang relatif rendah, tetapi menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, maka hal ini dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Biaya adalah keseluruhan pengeluaran baik yang sifat uang maupun bukan uang, sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak terhadap upaya pencapaian tujuan yang sudah ditentukan. Biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang sebagai ungkapan tanggung jawab semua pihak (masyarakat, orang tua dan pemerintah) terhadap pembangunan pendidikan yang dicita-citakan tercapai secara efisien dan efektif, yang harus digali dari berbagai sumber, dipelihara, dikonsolidasikan, dan ditata secara administratif sehingga dapat digunakan secara efisien dan efektif. Secara sederhana, biaya pendidikan dapat divisualisasikan melalui gambar sebagai berikut:¹²

¹¹ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2010), 55-57

¹² Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 7-8



Gambar 1:
Konsep Biaya Pendidikan

4. Politik Ekonomi dan Pendidikan

a. Politik Ekonomi

Politik ekonomi atau kebijakan ekonomi adalah cara-cara yang ditempuh dan tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah. Cara dan tindakan ini untuk mengatur kehidupan ekonomi nasional guna mencapai tujuan-tujuan di bidang ekonomi, terutama kemakmuran masyarakat. Beberapa bentuk politik ekonomi yang penting sebagai berikut.

1. Politik fiskal yaitu kebijaksanaan pemerintah dalam mengatur keuangan negara, khususnya di bidang perpajakan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Politik moneter yaitu kebijaksanaan pemerintah (melalui Bank Sentral) dalam mengatur keuangan dan perkreditan, misalnya jumlah uang beredar, batas-batas pemberian kredit, dan tinggi rendahnya tingkat bunga.
3. Politik produksi yaitu kebijaksanaan pemerintah untuk meningkatkan produksi dalam negeri dengan menggunakan sumber-sumber alam secara efisien.

4. Politik ekonomi yang ditujukan untuk melindungi dan memajukan industri dalam negeri disebut sebagai kebijaksanaan proteksionisme.
5. Politik perdagangan luar negeri yaitu kebijaksanaan pemerintah yang berhubungan dengan ekspor dan impor, neraca pembayaran, utang luar negeri, kurs valuta asing, dan kerja sama internasional.
6. Politik harga dan upah yaitu kebijaksanaan pemerintah dalam mengawasi dan mengendalikan harga-harga barang dan upah.
7. Politik sosial atau ketenagakerjaan yaitu kebijaksanaan pemerintah dalam hal penciptaan kesempatan kerja, hubungan tenaga kerja, dan kesejahteraan karyawan.

Untuk setiap bidang yang penting, pemerintah mempunyai suatu kebijaksanaan, misalnya dalam bidang kependudukan, pertambangan, perkoperasian, dan sebagainya.¹³

b. Politik dan Pembiayaan Pendidikan

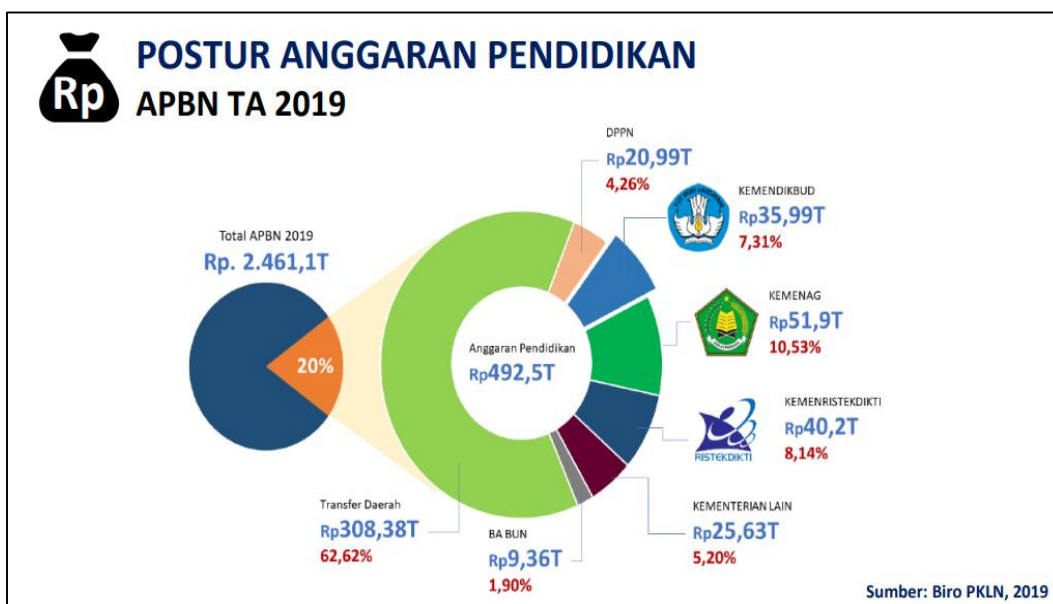
Dalam undang-undang No. 2 Tahun 1989 jo. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa sumber daya pendidikan adalah merupakan pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang berwujud tenaga, dana sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan pemerintah baik berdiri sendiri maupun bersama-sama. Pada pasal lain disebutkan secara lebih jelas bahwa pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan/atau keluarga peserta didik. Sedangkan biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan disatukan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab pemerintah dan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab badan/perorangan yang menyelenggarakan satuan pendidikan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya ditangan pemerintah dan masyarakat sehingga penentuan aspek-aspek pendidikan dan biaya lebih banyak ditentukan oleh pemerintah yaitu Kementrian Keuangan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang secara bersama-sama mengatur baik aspek kegiatan pendidikan maupun aspek biaya.¹⁴

¹³ M. Dinar dan M. Hasan, *Pengantar Ekonomi...*, 9

¹⁴ Matin, *Manajemen Pembiayaan...*, 3-4

Untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pembiayaan pendidikan dimungkinkan terfokus untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Kota (UU No. 20 Tahun 2003) dijelaskan bahwa: bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pusat membiayai pendidikan melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disalurkan ke APBD Kabupaten/Kota yang dicatat dalam program Dinas Pendidikan. Selain itu APBD provinsi juga diarahkan membantu APBD Kabupaten/Kota untuk membiaya pendidikan SMP, SMA/SMK serta pendidikan nonformal dan informal dan pendidikan luar biasa. APBD Provinsi berbentuk Hibah yang disalurkan ke APBD Kabupaten/Kota, serta dapat menyalurkan hibah langsung dalam bentuk aturan ke sekolah-sekolah tersebut.

Pembiayaan pendidikan yang dilakukan institusi swasta umumnya diharapkan dari dewan penyantunan dan para siswa melalui orang tua/wali dan sponsor (stakeholder). Tapi tidak menutup kemungkinan memperoleh bantuan program pembiayaan dari pemerintah pusat dan daerah yang umumnya dalam bentuk program pemberdayaan guru dan siswa. Beberapa institusi swasta seperti sekolah Madrasah dalam pesantren mendapat bantuan dari Islamic Development Bank berupa bantuan pembangunan infra struktur pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah serta fasilitas pembelajaran.¹⁵



¹⁵ Manatahan Tampubolon, *Perencanaan dan Keuangan Pendidikan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 7

C. Kesimpulan

Untuk membentuk sistem kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat dibutuhkan kolaborasi kekuatan politik, kemapanan ekonomi dan kemampuan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia yang beradab dapat dilakukan melalui sektor pendidikan baik formal maupun non formal. Maka perhatian pemerintah terhadap pendidikan suatu negara harus menjadi salah satu agenda besar dalam membuat kebijakan. Sumber daya manusia atau pendidikan yang bermutu sangat tergantung kebijakan pemerintah dalam menentukan alokasi anggaran pendidikan. Sehingga, dengan adanya dukungan politik dari pemerintah, SDM yang berkualitas dan mapan secara ekonomi, kemakmuran berada dalam genggaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya, ***Sistem Politik Indonesia (cet. I)***, (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- Anwar, Kasful, “Dimensi Hubungan Negara, Politik dan Pendidikan”. ***Jurnal Ta’dib***, Vol. Xv. No. 02. Edisi, Nopember 2010
- Dinar, M. dan Hasan, M., ***Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi***, (Jakarta: Pustaka Taman Ilmu, 2018)
- Heywood, Andrew, ***Politics (2nd Edition)***, (New York: Palgrave MacMillan, 2002)
- Matin, ***Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasi***, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014)
- Mulyono, ***Konsep Pembiayaan Pendidikan***, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2010)
- Tampubolon, Manatahan, ***Perencanaan dan Keuangan Pendidikan***, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015)